

Efektivitas Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia

Niken Amalina Setiyani

Universitas Islam 45 Bekasi, Indonesia

*Corresponding author email: [1 nikenamalina01@gmail.com](mailto:nikenamalina01@gmail.com)

Article info

Article history:

Received : 28 Desember 2025

Accepted : 30 Desember 2025

Published: 30 Desember 2025

Keywords:

SIPD; Tata Kelola Pemerintahan Daerah;
Efektivitas; Sistem Informasi Pemerintahan.

DOI:

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penerapan SIPD dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian menggunakan literature review dengan menganalisis hasil penelitian terdahulu yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIPD mampu meningkatkan efisiensi administrasi, akurasi data, serta transparansi pengelolaan keuangan daerah. Namun, efektivitas penerapannya belum merata karena masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, ketidakstabilan server, fitur sistem yang belum lengkap, rendahnya kompetensi sumber daya manusia, serta resistensi terhadap perubahan dari sistem lama. Faktor pendukung utama meliputi manfaat sistem yang dirasakan pengguna, dukungan kebijakan pemerintah pusat. Dengan demikian, efektivitas SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis, kualitas SDM, serta konsistensi implementasi di level perangkat daerah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memperkuat implementasi SIPD guna mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih baik.

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of SIPD implementation in supporting transparency, accountability, and efficiency in local government administration in Indonesia, as well as to identify supporting and inhibiting factors. The research method used a literature review by analyzing the results of relevant previous studies conducted over the past five years. The results show that SIPD can improve administrative efficiency, data accuracy, and transparency in regional financial management. However, its effectiveness has not been evenly distributed due to various obstacles, such as limited technological infrastructure, server instability, incomplete system features, low human resource competence, and resistance to change from the old system. The main supporting factors include the benefits of the system as perceived by users and the support of central government policies. Thus, the effectiveness of SIPD is greatly influenced by technical readiness, the quality of human resources, and consistency of implementation at the regional apparatus level. This study

is expected to serve as a reference for the central and regional governments in strengthening the implementation of SIPD to realize better regional governance.

PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah di Indonesia menghadapi tuntutan yang semakin kompleks dalam era digital dan keterbukaan informasi publik. Dalam otonomi daerah, Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pengelolaan pemerintahan daerah harus diarahkan untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi publik, serta meningkatkan daya saing daerah dengan melihat prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan kesetaraan. Sejalan dengan itu, perbaikan tata kelola pemerintahan daerah menuntut sistem yang mampu mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, khususnya dalam pengelolaan data pembangunan dan keuangan daerah. Di tengah perubahan tersebut, pemerintah memperkenalkan sistem elektronik terpadu yaitu SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang mengatur bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan dan mengelola informasi pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung berbasis elektronik.

Pada praktiknya, penerapan SIPD di tingkat pemerintah daerah menghadirkan fenomena yang menarik sekaligus menantang. Sistem ini dirancang untuk menggantikan sejumlah aplikasi sebelumnya, seperti SIMDA, dan menjadi platform tunggal integrasi data perencanaan pembangunan, keuangan, dan pemerintahan daerah lainnya (Nasution & Nurwani, 2021). Namun, meskipun regulasi sudah mengatur, banyak daerah yang masih mengalami hambatan teknis, sumber daya manusia, dan infrastruktur yang belum siap. Penelitian pada Kantor DPRD di Kota Medan menunjukkan adanya menu input SIPD yang belum lengkap, jaringan yang sering error, serta transisi dari sistem lama yang menyebabkan hambatan dalam penyusunan anggaran kas dan pelaporan keuangan (Sijabat et al., 2024). Kondisi ini mencerminkan bahwa regulasi saja tidak cukup; efektivitas penerapan sistem masih dipengaruhi oleh faktor kontekstual di masing-masing daerah.

Permasalahan yang dihadapi saat ini berkaitan dengan efektivitas SIPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah, khususnya pada aspek transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi. Penelitian oleh (Septiani & Isnawaty, 2025) menunjukkan bahwa meskipun SIPD telah membantu pengelolaan data keuangan secara lebih terstruktur dan meningkatkan efisiensi administrasi pada lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, masih ditemukan kendala

seperti ketidakstabilan server, integrasi sistem yang belum sempurna, dan fitur yang terbatas dibanding sistem sebelumnya. Selain itu, penelitian oleh (Ronald et al., 2022) menemukan bahwa tata kelola SIPD meliputi keselarasan strategis, pengelolaan sumber daya, dan pengukuran kinerja belum berjalan baik di mana keselarasan antara aspek perencanaan dan penganggaran belum optimal, serta aparatur belum sepenuhnya memahami sistem.

Tantangan lainnya muncul dari penelitian yang mengungkap bahwa masih terdapat masalah dalam penggunaan SIPD, yaitu belum maksimalnya integrasi dan interoperabilitas antar sistem, sumber daya manusia yang belum siap, serta kondisi infrastruktur yang belum mendukung. Penelitian oleh (Ardiningrum & Tukiman, 2025) menunjukkan bahwa di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, implementasi SIPD dalam lingkup penatausahaan keuangan belum efektif dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah. Penelitian lain oleh (Anjani et al., 2024) menunjukkan bahwa SIPD berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kecamatan Cicalengka, meskipun sistem pengendalian internal tidak menunjukkan pengaruh signifikan. Keterbatasan-keterbatasan ini menandakan bahwa penerapan SIPD belum secara otomatis menghasilkan tata kelola pemerintahan yang ideal, melainkan masih memerlukan adaptasi dan perbaikan yang berkelanjutan.

Berdasarkan beberapa penelitian yang disebutkan, peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai efektivitas penerapan SIPD dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Sehingga dapat dirumuskan penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa efektif penerapan SIPD dalam mendukung tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pendukung serta penghambat efektivitas dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Secara teori, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dalam kajian sistem informasi pemerintahan daerah dan tata kelola pemerintahan melalui pendekatan yang lebih menyeluruh. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan di tingkat pusat maupun daerah untuk meningkatkan kualitas implementasi SIPD, memperkuat kompetensi aparatur, memadai infrastruktur teknologi, serta memperbaiki tata kelola internal agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

KAJIAN TEORI

Efektivitas

Efektivitas dalam konteks organisasi publik dapat dipahami sebagai sejauh mana organisasi mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara optimal, dengan menggunakan sumber daya yang tersedia untuk menghasilkan output dan

outcome yang diharapkan. Penelitian oleh (Damayanti et al., 2022) menyebutkan bahwa efektivitas pelayanan publik adalah kemampuan organisasi dalam mencapai sasaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan waktu, sasaran konkret, dan dasar hukum. Menurut (Sutmasa, 2021) dalam kebijakan publik, efektivitas berkaitan dengan sejauh mana implementasi kebijakan menghasilkan dampak yang nyata (outcomes) dan bukan hanya kegiatan (outputs). Dapat disimpulkan bahwa efektivitas diartikan sebagai ukuran keberhasilan pelaksanaan program atau sistem dalam menghasilkan hasil yang sesuai tujuan.

Sistem Informasi Pemerintah Daerah

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) adalah aplikasi atau platform berbasis web yang dipersyaratkan oleh peraturan untuk mendukung pengelolaan data pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintah daerah lainnya berbasis elektronik (Septiani & Isnawaty, 2025). SIPD berfungsi sebagai instrumen strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan integrasi data dalam rangka mendukung perencanaan, penganggaran, dan pelaporan pembangunan daerah (Sobandi et al., 2023).

Tata Kelola Pemerintahan Daerah

Tata kelola pemerintahan daerah mengacu pada cara penyelenggaraan pemerintahan di tingkat daerah yang meliputi proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pertanggungjawaban publik, dengan orientasi pada prinsip transparansi, partisipasi, akuntabilitas, efektivitas dan keadilan agar tercapai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Hasriani, 2024). Menurut (Undang, 2024) tata kelola pemerintahan daerah dipahami sebagai kerangka manajemen publik yang mengatur hubungan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta serta proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik di daerah. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik memerlukan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sebagai pemangku kepentingan utama dalam mewujudkan *good governance* di tingkat daerah (Riwanto & Suryaningsih, 2024).

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *literature review* dengan pendekatan analisis isi. Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah sepuluh artikel jurnal ilmiah yang relevan dengan topik penelitian dan diterbitkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pemilihan jurnal dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kesesuaian tema, kredibilitas sumber, serta kontribusinya terhadap pembahasan penelitian. Selanjutnya, teknik analisis isi

digunakan untuk mengkaji secara sistematis isi setiap artikel, khususnya pada bagian tujuan, metode, temuan, dan kesimpulan penelitian. Proses analisis dilakukan dengan mengidentifikasi pola, persamaan, dan perbedaan hasil penelitian antarjurnal sehingga diperoleh gambaran yang utuh dan mendalam mengenai isu yang diteliti. Hasil dari analisis tersebut kemudian disintesis secara logis untuk menjawab tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Hasil *Literature Review*

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	(Nasution & Nurwani, 2021)	Analisis penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan	Penerapan SIPD masih belum optimal karena masih dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kesiapan sarana-prasarana, koordinasi antarinstansi, serta kendala teknis sistem.
2.	(Sobandi et al., 2023)	Studi literatur Efektivitas penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPD masih belum berjalan efektif karena adanya berbagai kekurangan yang menghambat proses perencanaan pembangunan. Keterbatasan pada fitur dan kinerja sistem membuat aparatur daerah belum dapat bekerja secara optimal. Pengetahuan dan keterampilan SDM juga perlu ditingkatkan.
3.	(Ronald et al., 2022)	Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) (Studi pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BP4D) Kabupaten Belu)	Tata kelola SIPD masih belum berjalan dengan baik, terutama pada keselarasan strategis, penganggaran belum terintegrasi secara optimal dan pemahaman aparatur terhadap fitur sistem masih rendah.
4.	(Sijabat et al., 2024)	Penerapan SIPD (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) dalam Pengelolaan Keuangan pada Kantor DPRD Kota Medan.	Penerapan SIPD terbukti mengoptimalkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan melalui proses digital yang lebih cepat dan akurat. Namun, efektivitas sistem masih terhambat oleh kendala teknis

			seperti jaringan yang tidak stabil serta keterbatasan perangkat, kemampuan SDM yang belum merata dan resistensi terhadap perubahan.
5.	(Lumuly & Atarwaman, 2024)	Pengaruh Implementasi dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintahan Kota Ambon (Studi empiris pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Ambon)	Implementasi SIPD tidak memberikan pengaruh langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, ketika sistem tersebut digunakan secara efektif, barulah terlihat adanya peningkatan kualitas laporan keuangan.
6.	(Anjani et al., 2024)	Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan di Kecamatan Cicalengka	SIPD berpengaruh signifikan pada peningkatan kualitas laporan keuangan, namun Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh signifikan.
7.	(Septiani & Isnawaty, 2025)	Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat	SIPD membantu menata pengelolaan data keuangan dengan lebih sistematis serta mempercepat proses administrasi. Namun, masih terdapat hambatan seperti kesalahan input manual, fitur yang belum selengkap aplikasi sebelumnya yaitu (SIPKD), gangguan server, dan integrasi sistem yang belum optimal.
8.	(Ardiningrum & Tukiman, 2025)	Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam mengoptimalkan pengelolaan keuangan di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bojonegoro	SIPD dinilai tidak efektif karena kualitas sistem dan kualitas informasi masih rendah karena fitur yang belum lengkap, tampilan yang kurang nyaman, proses kerja yang tidak efisien, serta keterbatasan akses dokumen dan informasi pada beberapa bidang. Namun, kualitas pelayanan menjadi indikator yang

			paling baik, ditandai dengan respons cepat dari PUSDATIN dan dukungan komunikasi yang memadai.
9.	(Iqbal et al., 2022)	Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	SIPD mampu meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan melalui integrasi data dan kemudahan akses informasi, namun masih ditemukan keterbatasan pada konsistensi data antarperangkat daerah.
10.	(Balqis & Fadly, 2021)	Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat	SIPD dinilai cukup efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, tetapi proses input data masih terhambat oleh kurangnya pelatihan dan kondisi jaringan.

Sumber: Peneliti, 2025

Efektivitas Penerapan SIPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia

Penerapan SIPD dalam tata kelola pemerintahan daerah menunjukkan hasil yang beragam. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa penelitian mengungkapkan bahwa SIPD mampu meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akurasi informasi, terutama pada proses pengelolaan keuangan. Penelitian (Sijabat et al., 2024) menegaskan bahwa digitalisasi melalui SIPD membuat proses administrasi keuangan menjadi lebih cepat dan akurat, sehingga mendorong terciptanya tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Temuan ini diperkuat oleh (Anjani et al., 2024) yang menunjukkan bahwa SIPD memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, karena seluruh data keuangan terdokumentasi secara lebih terstruktur. Selain itu, (Septiani & Isnawaty, 2025) menemukan bahwa penggunaan SIPD telah mempermudah proses penataan data keuangan pada lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat, sehingga proses administrasi berjalan lebih sistematis dan efisien. Temuan-temuan tersebut menunjukkan bahwa SIPD memiliki potensi besar dalam mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan daerah melalui integrasi data serta percepatan akses informasi.

Namun, efektivitas SIPD masih belum merata di seluruh daerah. Sejumlah penelitian mengungkapkan bahwa sistem ini belum berfungsi optimal karena

adanya kendala teknis dan struktural. (Nasution & Nurwani, 2021) menyatakan bahwa di Kota Medan, SIPD belum berjalan efektif karena keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan sarana pendukung, serta gangguan teknis pada sistem. Hal serupa terlihat pada temuan (Sobandi et al., 2023) yang menyatakan bahwa fitur SIPD masih belum memadai untuk mendukung perencanaan pembangunan secara komprehensif. Menurut (Ronald et al., 2022) juga menunjukkan bahwa tata kelola SIPD belum baik karena keselarasan perencanaan dan penganggaran belum optimal dan pemahaman aparatur terhadap sistem masih rendah. Beberapa penelitian lain seperti (Ardiningrum & Tukiman, 2025) dan (Balqis & Fadhly, 2021) juga menunjukkan bahwa SIPD belum cukup efektif karena adanya keterbatasan fitur, tampilan sistem yang kurang nyaman, serta proses input data yang lambat akibat jaringan tidak stabil. Keseluruhan temuan ini menegaskan bahwa efektivitas SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan teknis, kualitas SDM, serta konsistensi pemanfaatan sistem di tiap perangkat daerah.

Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penerapan SIPD dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah di Indonesia

Faktor pendukung penerapan SIPD terutama berasal dari aspek manfaat sistem, dukungan kelembagaan, dan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong digitalisasi tata kelola daerah. Penelitian oleh (Sijabat et al., 2024) menunjukkan bahwa salah satu faktor pendukung utama adalah adanya manfaat nyata dari penggunaan SIPD, seperti kecepatan proses administrasi, akurasi pencatatan keuangan, dan peningkatan transparansi data. Selain itu, penelitian (Ardiningrum & Tukiman, 2025) menemukan bahwa dukungan layanan yang diberikan PUSDATIN menjadi faktor penting karena respons yang cepat membantu aparatur daerah menyelesaikan kendala teknis saat menggunakan sistem. Temuan (Iqbal et al., 2022) juga menunjukkan bahwa integrasi data pada SIPD menjadi kekuatan utama yang memperlancar proses perencanaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Dengan demikian, faktor pendukung yang paling menonjol mencakup manfaat sistem yang dirasakan langsung, dukungan teknis dari pusat, serta kebijakan yang mengharuskan pemerintah daerah menggunakan SIPD secara seragam.

Di sisi lain, terdapat berbagai faktor penghambat yang membuat penerapan SIPD belum berjalan efektif. Kendala besar muncul dari aspek teknis, seperti jaringan yang tidak stabil, server yang sering mengalami gangguan, serta fitur yang belum lengkap, sebagaimana ditemukan oleh (Septiani & Isnawaty, 2025) dan (Sijabat et al., 2024). Faktor penghambat lainnya berasal dari keterbatasan kompetensi sumber daya manusia. Menurut (Nasution & Nurwani, 2021) menekankan bahwa pemahaman aparatur terhadap fitur-fitur SIPD masih rendah

sehingga data yang diinput tidak konsisten dan proses kerja menjadi lambat. Penelitian oleh (Sobandi et al., 2023) juga menyoroti bahwa rendahnya keterampilan aparatur dalam mengoperasikan SIPD membuat proses perencanaan pembangunan tidak berjalan optimal. Selain itu, adanya resistensi terhadap perubahan seperti dijelaskan oleh (Balqis & Fadhly, 2021) menjadi salah satu hambatan karena sebagian pegawai masih terbiasa menggunakan sistem lama dan belum siap beradaptasi dengan SIPD. Faktor birokratis dan koordinasi antarinstansi yang belum baik juga menjadi penghambat sebagaimana tercermin pada penelitian (Ronald et al., 2022). Secara keseluruhan, faktor penghambat SIPD mencakup masalah teknis, keterbatasan SDM, resistensi perubahan, serta belum optimalnya koordinasi antarperangkat daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Indonesia memiliki kemampuan dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. SIPD terbukti membantu mengorganisir data keuangan secara lebih sistematis, mempercepat proses administrasi, serta menyediakan akses informasi yang lebih akurat bagi perangkat daerah. Namun, efektivitas ini belum merata karena masih banyak daerah yang menghadapi kendala teknis seperti server tidak stabil, fitur sistem yang belum lengkap, serta keterbatasan jaringan. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga menjadi hambatan penting, karena masih banyak aparatur yang belum memahami cara kerja SIPD secara optimal dan menunjukkan resistensi terhadap perubahan dari sistem lama ke sistem baru. Dengan demikian, efektivitas SIPD sangat dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, dukungan kebijakan, serta konsistensi implementasi di setiap daerah.

Untuk mengoptimalkan efektivitas penerapan SIPD di masa mendatang, pemerintah daerah perlu mendukung kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang berkelanjutan dan pendampingan teknis agar aparatur benar-benar mampu mengoperasikan SIPD secara optimal. Pemerintah pusat juga perlu memperbaiki infrastruktur teknologi, termasuk memastikan stabilitas server, peningkatan kualitas fitur, dan memperkuat integrasi sistem antarinstansi. Selain itu, koordinasi antara perangkat daerah harus ditingkatkan agar data yang diinput lebih konsisten dan sesuai standar yang ditetapkan. Pemerintah daerah juga disarankan membangun budaya kerja yang adaptif terhadap digitalisasi guna mengurangi resistensi terhadap perubahan. Secara keseluruhan, keberhasilan SIPD tidak hanya mengandalkan pada sistem yang digunakan, tetapi juga pada kesiapan

organisasi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

Daftar Pustaka

- Anjani, N. A. R., Gunardi, Sudrajat, A., & Framesthi, D. B. (2024). *Pengaruh Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Di Kecamatan Cicalengka*. 18(April).
- Ardiningrum, S. D., & Tukiman. (2025). *Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Mengoptimalkan Pengelolaan Keuangan Di Badan Pengelolaan Keuangan Dan Adet Daerah Kabupaten Bojonegoro*. 8(2), 1184–1189.
- Balqis, N., & Fadly, Z. (2021). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja (Distranaker) Kabupaten Aceh Barat*. 2.
- Damayanti, D. A., Yuningsih, N. Y., & Akbar, I. (2022). *Efektivitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Masa Peralihan Layanan Tahun 2021 Di Kota Bandung*. 2, 323–337.
- Hasriani. (2024). *Implementasi Good Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kelurahan Parangloe Kecamatan Tamalanrea Kota Makassar*. 10(2), 186–198.
- Iqbal, M. M., Handayani, S., & Safitri, D. I. (2022). *Efektivitas Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Sipd) Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah*. 3(2), 173–185. <Https://Doi.Org/10.33474/Jisop.V3i2.11192>
- Lumuly, E., & Atarwaman, R. J. D. (2024). *Pengaruh Implementasi Dan Efektivitas Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd), Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Kota Ambon (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah (Opd) Kota Ambon)*. 6(2), 147–159.
- Nasution, M. I., & Nurwani. (2021). *Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan*. 9(77).
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 70 Tahun 2019 Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (2019). <Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/127924/Permendagri-No-70-Tahun-2019>
- Riwanto, A., & Suryaningsih, S. (2024). *Strategi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah Yang Baik*. 9, 1–20.
- Ronald, M., Asa, A., Setyowati, E., & Wike. (2022). *Tata Kelola Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) (Studi Pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian*

- Dan Pengembangan Daerah (Bp4d) Kabupaten Belu) Milicheor. 5(4), 346–352.*
- Septiani, I., & Isnawaty, N. W. (2025). *Efektivitas Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah Di Sekretariat Dprd Provinsi Jawa Barat. 7, 193–208.*
- Sijabat, J., Judika, M., Siringoringo, B., Findy, G., & Simanjuntak, R. (2024). *Penerapan Sipd (Sistem Informasi Pemerintah Daerah) Dalam Pengelolaan Keuangan Pada Kantor Dprd Kota Medan. 9(1), 1169–1183.*
- Sobandi, A., Febrianto, A. S., & Herdiant, D. S. (2023). *Studi Literatur Efektivitas Penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Untuk Menunjang Perencanaan Pembangunan Daerah. 22(1), 125–134.*
- Sutmasa, Y. G. (2021). *Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. 04(01), 25–36.*
- Undang-Undang (Uu) Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah.
<Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/38685/Uu-No-23-Tahun-2014>
- Undang, G. (2024). *Mengevaluasi Kembali Tatakelola Pemerintahan Daerah Di Indonesia. 7(1), 121–130.*